

POTRET PERTUMBUHAN EKONOMI, KESENJANGAN DAN KEMISKINAN DI INDONESIA DALAM TINJAUAN EKONOMI POLITIK PEMBANGUNAN

Hilmi Rahman Ibrahim

Dosen Tetap Prodi HI, FISIP Universitas Nasional

hilmi_rahman69@yahoo.com

Abstract

Of several arguments explaining about the success of economic development of a country is the high rate of growth. Claims are made that indicative of prospect for such growth is the development of infrastructure. And the “philosophy” of economic development is the call for foreign investment and foreign debts to be invited to the country. What is missing is, instead, the hidden economic disparity that is potential in putting infrastructure development top priority. Unless control over the high rate is made effective, the high rate of growth would correlate with economic disparity whereby the regime in power would undergo more risks and in the long run would deteriorate political legitimacy. Indonesia’s gini ratio index in the last three years has been at 0.42 indicating strong alarm of danger. Unless improvement is made Indonesia is likely to encounter social chaos. The paper is an account of the issue in the perspective of political economy.

Keywords: *Growth, disparity, poverty, political legitimacy*

Pendahuluan

Bagi pemerintah, ekonomi yang tumbuh diperlukan untuk memperkuat struktur perekonomian nasional terutama dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang terus meningkat, seiring dengan peningkatan angkatan kerja rata- ata pertahun. Disamping itu pergerakan ekonomi dapat mendorong peningkatan daya beli masyarakat sebagai kekuatan ekonomi domestik yang sangat penting. Pertumbuhan dapat mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui program strategis bersifat jangka pendek dengan memberikan porsi terbesar kepada sektor pengembangan usaha ekonomi mikro dan UKM

Namun jika pertumbuhan ekonomi yang tidak terkendali justru akan mendorong terjadinya disparitas antar sektor, kesenjangan antar pelaku usaha ekonomi serta kesenjangan pendapatan dalam masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas perlu diperkuat dengan pilihan kebijakan ekonomi yang memberikan pemihakan dan kesempatan serta akses luas kepada masyarakat. Pertumbuhan yang hanya mendorong konsentrasi ekonomi terpusat atau bersifat monopoli, serta cenderung dikuasi oleh kelompok ekonomi besar justru memperpanjang mata rantai kesenjangan ekonomi dalam berbagai sektor

Pertumbuhan ekonomi yang tidak berkualitas adalah pertumbuhan yang tidak terkendali disertai dengan penguasaan ekonomi secara tidak berimbang. Pertumbuhan ekonomi seperti ini akan melahirkan kesenjangan ekonomi dan kemiskinan yang lebih terbuka. Kondisi tersebut semakin diperparah dengan masuknya arus investasi asing yang cenderung monopoli serta tidak menimbulkan mata rantai ekonomi baru (multiflier effect) yang dapat mendorong dan mempercepat pembangunan ekonomi ditingkat bawah. Bila pertumbuhan ekonomi tidak dikendalikan oleh pemerintah secara ketat dan cenderung mengikuti arus pasar (market mechanism) serta hanya memberikan keleluasaan kepada investor dan pelaku ekonomi besar, maka bukan tidak mungkin Indonesia akan mengalami fase kesenjangan pembangunan (development gap)

Perhatian pemerintah terhadap persoalan ekonomi domestik tidak bisa mengandalkan pertumbuhan sebagai kekuatan utama dalam peningkatan kesejahteraan dan peningkatan daya beli masyarakat, melainkan diperlukan afirmasi atau keberpihakan kebijakan sebagai instrumen penyeimbang dan menjadi agenda utama dalam mewujudkan pemerataan kesempatan berusaha, akses terhadap sumber ekonomi serta kesetaraan dalam mengelola program ekonomi nasional

Kesenjangan ekonomi di Indonesia merupakan persoalan klasik yang tidak pernah tuntas, sekalipun setiap rezim pemerintahan selalu berupaya untuk menurunkan kesenjangan ekonomi (ratio gini) dan angka kemiskinan dengan melakukan berbagai solusi kebijakan, namun upaya tersebut belum memadai, bahkan cenderung tidak beranjak turun. Kondisi ini semakin memprihatinkan, terlebih Indonesia menghadapi berbagai masalah ekonomi yang cukup pelik, mulai dari daya beli masyarakat rendah, kesenjangan ekonomi antar pelaku, penguasaan konsentrasi ekonomi,

penerimaan dari sektor pajak yang kian menurun, ketersediaan anggaran belanja negara semakin terbatas serta pengendalian utang luar negeri yang tidak terkontrol.

Mengejar Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi selalu menjadi satu kesatuan, sekalipun pengertiannya berbeda. Pembangunan (economy development) diartikan sebagai suatu proses perubahan terus menerus menuju ke arah perbaikan ekonomi, yang mencakup pertumbuhan ekonomi yang diikuti perubahan dalam struktur dan corak kegiatan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sementara pembangunan ekonomi (economic growth) adalah proses kenaikan output dalam jangka panjang.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu aspek penting dari pembangunan ekonomi. Oleh karena itu pandangan ekonomi klasik percaya bahwa pertumbuhan ekonomi dapat diciptakan melalui peningkatan investasi modal yang dikombinasikan dengan penurunan berbagai hambatan (deregulasi dan insentif pajak) dalam proses produksi barang dan jasa. Pandangan ini memiliki kesamaan terhadap kebijakan pemerintah saat ini dengan strategi pembangunan infrastruktur, deregulasi ekonomi, penurunan suku bunga dalam upaya mendorong investasi yang sedang berjalan

Ekonomi yang bergerak dapat dilakukan melalui peningkatan daya beli masyarakat. Oleh karena itu pemerintah harus tetap menjaga stabilitas daya beli masyarakat melalui pendekatan side demand, dimana kebutuhan masyarakat akan direspon dengan peningkatan produksi sehingga terjadi peningkatan permintaan dalam ekonomi domestik. Sebaliknya jika produksi ditingkatkan, sementara permintaan tidak ada maka yang terjadi adalah penumpukan barang produksi yang justru menimbulkan kerugian

Karena dengan pertumbuhan ekonomi yang signifikan maka program pembangunan strategis yang ditargetkan pemerintah dapat berjalan dengan baik. Sekalipun kenyataannya pertumbuhan ekonomi di tahun 2016 yang oleh pemerintah ditargetkan akan tumbuh 5,2 persen, ternyata hanya mampu mencapai 5 persen, Angka ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan baik terhadap perolehan pendapatan, penyerapan lapangan kerja, juga dipastikan akan berdampak pada daya beli masyarakat yang menurun.

Sementara tingkat kesenjangan ekonomi (ratio gini) mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Bila kondisi ini terus terjadi, bukan tidak mungkin Indonesia akan menghadapi masalah sosial. Kesenjangan pembangunan antar wilayah juga masih terjadi sekalipun pemerintah pusat telah melakukan perhatian dan alokasi yang cukup besar terhadap pembangunan infrastruktur diluar Jawa, namun kondisi kesenjangan antar wilayah masih cukup tinggi

Sorotan pemerintah terhadap kesenjangan ekonomi kembali mengemuka setelah lembaga internasional INFID – OXFAM melansir laporan penelitiannya tentang ketimpangan ekonomi di Indonesia ahir Februari 2017 lalu. Laporan ini juga menjadi *alarm* bagi pemerintah, bahwa ditengah upaya mendorong pembangunan diberbagai sektor, terutama sektor infrastruktur, justru ketimpangan ekonomi kian meningkat disertai distribusi pendapatan yang tidak seimbang

Ketimpangan ekonomi sebagai fakta sosial, jelas akan berpengaruh terhadap dampak pembangunan, sekalipun masih terjadi perbedaan pendapat dikalangan pakar dan pengamat sosial bahwa masalah sosial tidak selalu berkaitan dengan kesenjangan ekonomi yang disebabkan oleh dampak ketimpangan pendapatan, namun kesenjangan ekonomi dan sosial tidak begitu saja diabaikan dan dianggap tidak eksis dalam perjalanan pembangunan selama ini, karena ia dapat menjadi jerami kering dan dapat tersulut oleh dampak pembangunan timpang dan akar kesenjangan ekonomi yang semakin melebar

Sejak Pemerintahan Jokowi- JK tahun 2014 Indonesia dihadapkan dengan berbagai krisis ekonomi global . Pelesuhan ekonomi internasional sejak 2014 sampai dengan sekarang (2016) telah merubah wajah ekonomi Indonesia dalam 5 tahun terakhir ini. Pada tahun 2010 - 2012 misalnya pertumbuhan ekonomi masih berada di level 6.2 sampai 6.5 persen, namun pada tahun 2013 mulai mengalami pelambatan hingga tahun 2015. Penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2015 menjadi 5,2 persen, bahkan di tahun 2016 pertumbuhan ekonomi hanya tumbuh 5 persen dari estimasi atau target 5.2 persen berdasarkan prognosa APBN 2016

Berdasarkan catatan BPS tahun 2016 angka kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan, sekalipun penurunannya sangat tipis atau lebih sedikit, dengan penurunan masing- masing sebagai berikut: (2010 :13.3 %)

,(2011: 12.5%), (2012: 11.7%), (2013 11.5%),(2014: 11%) dan (2015: 11.31%). Data tersebut diatas menunjukkan bahwa program pembangunan di Indonesia yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, belum mampu menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. Secara keseluruhan jumlah rakyat miskin pada tahun 2010 mencapai 31 juta orang, menurun menjadi 28.51 juta pada akhir tahun 2015.

Sekalipun angka kemiskinan mengalami trend penurunan, namun ternyata tidak menurunkan ketimpangan ekonomi secara lebih baik, bahkan sebaliknya, kecenderungan kesenjangan ekonomi semakin menaik. Data OXFAM tahun 2016 menunjukkan bahwa ratio gini mencapai 0.42 atau lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2010 yaitu sebesar 0,38. Dengan gambaran data tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi Indonesia cenderung meningkat dimana penguasaan dan konsentrasi ekonomi pada kelompok tertentu semakin kuat.

Ketimpangan Ekonomi sebagai Paradoks

Pencapaian Pendapatan Domestik Bruto (PDB) yang tinggi belum dapat mewujudkan sebagai fenomena penting bagi kualitas hidup rakyat. Tak heran jika saat sebagian kalangan bangga dengan prestasi pertumbuhan PDB yang kita capai, mayoritas rakyat justru kurang merasakan ada perbaikan taraf kehidupannya.

Disatu sisi, pencapaian pertumbuhan mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan memperbesar jumlah kelas menengah. Namun, disisi lain juga memperlebar ketimpangan ekonomi. Menurut Bank Dunia, manfaat dari pertumbuhan ekonomi lebih dinikmati oleh 20% masyarakat terkaya. Sementara sekitar 80% penduduk, lebih dari 205 juta orang terlihat merasa masih tertinggal. Upaya memperbaiki ketimpangan ekonomi memang tidak bisa dikesampingkan bersamaan dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi. Tetapi, perbaikan kualitas pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat menekan ketimpangan yang semakin melebar. Survei persepsi masyarakat pada 2014 yang dilakukan Bank Dunia menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia menilai distribusi pendapatan di Indonesia “sangat tidak setara” atau “tidak setara sama sekali”

Selain itu, isu ketimpangan kesejahteraan ini sangat penting untuk ditangani pemerintahan ketimbang mendorong pertumbuhan ekonomi. Ketimpangan ekonomi harus menjadi agenda serius pemerintahan seiring

upaya pemerintah memperbaiki kualitas pertumbuhan ekonomi. Pencapaian pertumbuhan yang tinggi tanpa dibarengi kualitas distribusi pendapatan justru dapat menimbulkan perlambatan pertumbuhan dan peningkatan risiko konflik sosial. Berdasarkan riset yang dilakukan Bank Dunia, saat total pendapatan kelompok 20% orang kaya naik 5%, pertumbuhan ekonomi malah melambat 0,4%.

Sebaliknya, ketika pendapatan kelompok 20% orang miskin naik 5%, ekonomi tumbuh 1,9%. Sedangkan negara dengan tingkat ketimpangan kesejahteraan yang tinggi berpotensi mengalami konflik 1,6 kali lebih besar. Hal itu karena ada perbedaan pendapatan antara satu daerah dan daerah lain. Untuk jangka panjang kondisi tersebut setidaknya akan menggerus sendi-sendi perekonomian. Meski ketimpangan ekonomi juga dialami banyak negara termasuk negara maju, ketimpangan ekonomi di Indonesia cenderung melaju lebih cepat. Hal ini menjadi tantangan serius bagi pemerintah dalam upaya memperbaiki distribusi pendapatan antar penduduk. Ketimpangan ekonomi yang terjadi dalam perekonomian tidak dapat dilepaskan dari kondisi struktural ekonomi yang masih timpang saat ini.

Perlunya Afirmasi Pembangunan

Pertumbuhan ekonomi melalui investasi penanaman modal asing mulai berkembang di Indonesia sejak penerapan undang-undang penanaman modal asing tahun 1967 dengan memberikan persyaratan dan peraturan-peraturan yang lebih ringan dan menarik kepada investor dibandingkan dengan kebijakan sebelumnya. Kegiatan industri meningkat tajam dan sangat pada GDP mengalami kenaikan dari sekitar 9 persen pada tahun 1970 menjadi 17 persen pada tahun 1992 (Booth dan McCawley, 1986:82 dan Sjahir 1993:16).

Pertumbuhan ekonomi sangat melejit, bahkan Indonesia sebelum mengalami krisis ekonomi tahun 1998 diprediksi menjadi salah satu negara macan Asia, karena tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan selama orde baru perekonomian mengalami kemajuan yang sangat pesat. Namun ketimpangan sosial atau sekelompok kecil masyarakat, terutama mereka yang memiliki akses dengan pengusaha politik dan ekonomi, sedangkan sebagian besar yang kurang atau hanya memperoleh sedikit manfaat. Bahkan, ada masyarakat merasa dirugikan dan tidak mendapatkan

manfaat sama sekali. Kesenjangan sosial semakin menguat dengan munculnya gejala monopoli.

Monopoli dan oligopoli akan membatasi akses usaha kecil untuk menggambarkan usaha mereka. Menurut Revtrison Baswer (dikutip dalam Bernes (1995:1)) hampir seluruh cabang produksi dikuasai oleh perusahaan konglomerat. Perusahaan-perusahaan besar konglomerat menguasai berbagai kegiatan produksi murni dari produksi, eksploitasi hasil hutan, konstruksi, industri otomotif, transportasi, perhotelan, makanan, perbankan, jasa-jasa keuangan, dan media komunikasi. Diperkirakan 200 konglomerat menguasai 58 persen PDB. Usaha-usaha rakyat yang kebanyakan kecil dan tradisional hanya menguasai 8 persen. Kesenjangan sosial ini tidak hanya mengganggu pertumbuhan ekonomi rakyat tetapi menyebabkan ekonomi rakyat mengalami proses marginalisasi.

Selain kebijakan ekonomi, kebijakan yang diduga turut menstimulasi kesenjangan sosial adalah kebijakan penataan lahan (tata ruang). Penerapan kebijakan penataan lahan selama ini belum dapat mendatangkan manfaat bagi masyarakat. Berbagai kekuatan dan kepentingan telah mempengaruhi dalam penerapan. Tarik menarik berbagai kekuatan dan kepentingan telah menimbulkan konflik antara pengusaha besar dan masyarakat. Dalam konflik seringkali kepentingan publik diabaikan dan cenderung mengutamakan kepentingan sekelompok orang (pengusaha).

Penelitian Suhendar (1994) menyimpulkan bahwa: “Kooptasi tanah-tanah: terutama dipedesaan oleh kekuatan besar ekonomi dan luar komunitas semakin menggejala. Pembangunan sektor ekonomi, seperti pembangunan kawasan industri, pabrik-pabrik, sarana wisata telah menyita banyak lahan penduduk. Demikian pula, instansi-instansi pemerintah memerlukan tanah untuk pembangunan perkantoran, instruktural ekonomi, fasilitas sosial, perumahan, dan lain-lain.

Di perkotaan, pemilik modal (konglomerat) bekerja sama dengan birokrasi membeli tanah-tanah penduduk untuk kepentingan pembangunan perumahan mewah, pusat perbelanjaan dan lain-lain. Begitu pula dipedesaan pemilik modal menggusur penduduk dan memanfaatkan lahan untuk kepentingan agroindustri, perumahan mewah, dan lapangan golf. Dalam banyak kasus, banyak tanah negara yang selama ini dikuasai penduduk dengan status tidak jelas dijadikan sasaran dan cara termudah untuk menggusur penduduk”

Di setiap rezim pemerintahan, salah satu ukuran keberhasilan pemerintahan adalah indikator penilaian kemampuan melakukan dan menyelenggarakan pembangunan serta berhasil dalam menurunkan kesenjangan ekonomi antar golongan dalam masyarakat. Dimana pun negara tolok ukur kesuksesan satu rezim antara lain karena ia dianggap berhasil menurunkan kesenjangan ekonomi (gap income percapita). Kesenjangan ekonomi atau yang lebih dikenal dengan kesenjangan pendapatan, kesenjangan kekayaan dan jurang antara yang kaya dan miskin mengacu pada persebaran ukuran ekonomi diantara individu dan kelompok dalam satu jumlah populasi tertentu yang biasanya diukur berdasarkan jumlah penduduk satu negara

Disparitas ekonomi dan pendapatan masyarakat di Indonesia kembali menjadi sorotan utama, terlebih karena pemerintahan Jokowi sedang giat giatnya melakukan pembangunan infrastruktur untuk memperkuat struktur dan *multiflier effect* ekonomi masyarakat yang dianggap mengalami ketertinggalan jauh, yang salah satu penyebabnya karena rendahnya dukungan dan ketersediaan infrastruktur dasar.

Berdasarkan data Bappenas tahun 2011, memperlihatkan bahwa ketimpangan di Indonesia naik karena disebabkan oleh berbagai faktor antara lain: . Pertama, masih banyak banyak anak-anak Indonesia, terutama dari rumah tangga miskin dan di desa, tidak memperoleh awal hidup yang sama dengan anak-anak dari keluarga yang lebih kaya. Akibatnya, mereka tumbuh dengan kesehatan dan keterampilan yang kurang. Sepertiga dari seluruh perbedaan pada standar hidup orang desa Indonesia saat ini disebabkan oleh faktor-faktor di luar kendali mereka: pendidikan orangtua mereka, tempat mereka lahir, dan jenis kelamin.

Kedua, hanya sebagian kecil sekolah tertentu memiliki keterampilan yang berguna untuk ekonomi modern dan mereka yang bisa memperoleh pemasukan lebih tinggi dari pekerjaan formal. Sebaliknya, sebagian besar pekerja tidak terampil terjebak dalam produktivitas rendah, gaji kecil, dan pekerjaan informal. Seiring waktu, kesenjangan pendapatan antara pekerja terampil dan tidak terampil mengakibatkan naiknya ketimpangan.

Ketiga, kepemilikan aset keuangan dan properti di Indonesia semakin terkonsentrasi di tangan mereka yang paling kaya. Estimasi menunjukkan bahwa 50% seluruh aset dimiliki oleh 1% penduduk Indonesia-konsentrasi kekayaan ini termasuk tertinggi di dunia. Individu-individu tersebut

mendapat pemasukan besar dengan memiliki berbagai aset, dan mengakibatkan ketimpangan yang semakin tinggi. Anak-anak akan mewarisi kekayaan tumbuh lebih beruntung dan mendapat manfaat dari pekerjaan yang lebih baik.

Data bappenas tahun 2011 menunjukkan bahwa 49 persen konsumsi hanya dinikmati seperlima masyarakat terkaya. Demikian pula dengan kekayaan Indonesia secara keseluruhan 60 persen pendapatan nasional hanya dikuasi oleh 1.2 persen penduduk Indonesia. Tingginya ketimpangan ekonomi, maka tidak ada jalan lain kecuali pemerintah harus berusaha menurunkan dan mengatasi ketimpangan dan memperkuat program yang bisa memperkuat perlindungan sosial, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi korupsi.

Upaya pemerintahan Joko Widodo untuk menghentikan laju kenaikan ketimpangan sebenarnya sudah dilakukan sejak awal pemerintahannya bahkan laporan Bank Dunia mengenai ketimpangan di Indonesia telah dipaparkan dalam rapat kabinet pemerintah dan sasaran resmi untuk menurunkan ketimpangan telah dimasukkan dalam rencana pembangunan jangka menengah. Beberapa tindakan penting sudah dilakukan. Sebagian besar subsidi BBM yang lebih dinikmati masyarakat mampu telah dikurangi dan dananya dialihkan untuk bantuan sosial, layanan kesehatan, dan investasi infrastruktur.

Membuka lapangan kerja telah dibantu melalui regulasi usaha dan pasar tenaga kerja yang lebih sederhana. Beberapa inisiatif baru untuk meningkatkan ketaatan pajak punya potensi menurunkan ketimpangan secara langsung (dengan mengurangi disparitas pemasukan) dan tidak langsung (dengan mendanai belanja pemerintah yang bermanfaat bagi masyarakat miskin). Masih banyak tindakan yang bisa dilakukan. Akses layanan kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat miskin dan anak-anak di desa sudah membaik, tetapi mereka sering menerima mutu layanan yang lebih rendah.

Upaya memastikan kesetaraan akses pendidikan yang bermutu perlu terus menerus diperkuat termasuk meningkatkan keterampilan mereka yang sudah bekerja, melalui balai latihan kerja yang tersedia. Peningkatan keterampilan pekerja saja belum cukup, melainkan harus ada pemihakan dari pemerintah yang jelas antara lain pemberian kesempatan bekerja untuk sentra produksi baik formal maupun informal

Pemerintah harus membuka diri dengan berbagai lembaga strategis, termasuk melakukan kerjasama dengan kampus-kampus agar bisa dilakukan penyiapan program yang dapat membantu masyarakat miskin dan rentan dari gejolak ekonomi. Harga pangan yang tinggi bisa dikurangi dengan memperbaiki produktivitas dan logistik pertanian, juga mengizinkan impor untuk menurunkan harga di saat persediaan kurang. Dan jaring pengaman sosial, jaminan bantuan sosial masih perlu diperkuat.

Kesenjangan Ekonomi wilayah

Kesenjangan ekonomi antar wilayah sejak orde baru sampai dengan orde reformasi masih terus terjadi, sekalipun upaya pemerintah terus dilakukan untuk menurunkan disparitas antar wilayah, namun kesenjangan wilayah masih saja terjadi. Kesenjangan ini berkaitan dengan strategi pembangunan Indonesia yang bertumpu pada aspek pertumbuhan ekonomi sejak masa orde baru. Sasaran pembangunan diarahkan untuk pencapaian pertumbuhan ekonomi tinggi, namun tidak memperhatikan pemerataan pembangunan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Walaupun aspek pemerataan sempat mendapatkan perhatian ketika urutan prioritas trilogi pembangunan diubah dari pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas pada Pelita II (1974-1979) menjadi pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas pada Pelita III (1979-1984), namun inti tumpuan pembangunan Indonesia tetap saja pertumbuhan (*growth* bukan *equity*). Dalam praktiknya, pemerintah hanya menetapkan target tingkat pertumbuhan yang hendak dicapai, namun tidak menetapkan target mengenai tingkat pemerataan. (Dumairy, 1996).

Kesenjangan sosial adalah keadaan yang tidak seimbang yang ada di masyarakat yang mengakibatkan perbedaan cukup mencolok. Sedangkan kesenjangan ekonomi adalah sebuah keadaan di mana terjadinya ketimpangan penghasilan antara masyarakat kelas atas dan kelas bawah sangat tinggi. Kesenjangan ekonomi dan kesenjangan sosial adalah masalah besar bagi negara Indonesia. Dari setiap periode pemerintahan belum bisa mengatasi akar masalah dari kesenjangan ini. Akar permasalahan dari kesenjangan ini adalah tidak meratanya pendapatan dari setiap warga negara Indonesia di setiap daerah, kemudian pembangunan yang tidak merata di setiap wilayah Indonesia.

Perbedaan status sosial dalam masyarakat, karena adanya stratifikasi dalam masyarakat, seperti halnya lulusan SMA dan lulusan sarjana tentu akan memiliki status yang berbeda. Kemiskinan di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor yang antara lain munculnya fatalisme, tingkat aspirasi, rendahnya kemauan mengejar sasaran, kurang melihat kemajuan pribadi, perasaan ketidakmampuan, dan perasaan untuk selalu gagal.

Pembangunan di Indonesia harus diakui masih terkonsentrasi dan berpusat di pulau Jawa. Terlebih pembangunan dan ketersediaan infrastruktu masih mendominasi, dengan harapan akan dapat memperluas hasil pembangunan di Indonesia. Namun faktanya pembangunan di Indonesia pada tahun 2010 yang diprediksi tumbuh 6,1% ternyata hanya mampu tumbuh 5,8%. Sementara itu produk domestik bruto naik dari 5.603,9 triliun pada 2009 menjadi 6.442,9 triliun rupiah, hal ini sangat jelas bahwa orang yang sangat kaya memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia.

Studi Bank Dunia (2015) menunjukkan bahwa periode 2001-2014 masyarakat yang merupakan 10% termiskin di Indonesia mengalami penurunan pendapatan sekitar 20%. Sementara 10% terkaya mengalami kenaikan pendapatan sekitar 60%, yang miskin menjadi kian miskin dan yang kaya makin kaya. Kalau kita bandingkan dengan negara tetangga, secara nilai absolut kesenjangan di Indonesia masih lebih baik dari Malaysia, Filipina, dan Thailand. Namun, ketiga negara itu berhasil mengurangi kesenjangannya sejak dekade 1990-an. Indonesia dalam kategori yang sama dengan China, India, dan Laos, juga mengalami kenaikan kesenjangan di ASEAN pada periode yang sama.

Pertanyaanya apakah kondisi ini dapat ditolerir secara sosial ? Hasil studi dari Simon Kutznet mempublikasikan temuannya yang masih diperdebatkan sampai sekarang tentang kesenjangan. Menurut Kutznet pada awal pembangunan dan ketika pendapatan per kapita masih rendah kesenjangan juga rendah. Ketika pendapatan naik maka kesenjangan naik, sampai pada satu titik di mana pendapatan naik tapi kesenjangan menurun. Saat ini negara maju dan kaya seperti Swedia dan Norwegia memiliki tingkat kesenjangan lebih rendah dibanding Indonesia pada dekade 1990-an.

Para penstudi kebijakan dan kesenjangan ekonomi melakukan suatu gerakan sosial yang didasarkan pada realitas ekonomi yang diebut dengan

Gerakan Occupy Wall Street dimulai tahun 2011 dengan slogan tajamnya "We are the 99%". Mereka secara efektif menunjukkan betapa 1% dari populasi menguasai sumber daya ekonomi secara sangat tidak proporsional. Pada 2015 Oxfam (lembaga swadaya masyarakat terkemuka di Inggris), melakukan studi yang menemukan bahwa bila harta 62 orang terkaya di dunia dijumlahkan, maka masih lebih besar dibandingkan 50% kekayaan penduduk dunia. Sungguh timpang perekonomian global.

Thomas Piketty menulis karya besarnya pada 2013, *Capital in the 21st Century*, yang telah terjual 1,5 juta kopi. Argumen utama yang diajukan Piketty bahwa kesenjangan ekonomi adalah dampak dari kapitalisme yang hanya bisa dikurangi dengan kebijakan aktif negara. Apabila kesenjangan dibiarkan terus melebar, orang superkaya akan bisa memengaruhi kebijakan ekonomi untuk lebih menguntungkan kaum kaya dan demokrasi akan menghadapi lonceng kematian

Rumus yang diajukan Piketty adalah membandingkan pertumbuhan pendapatan dari berbagai bentuk kapital (bunga tabungan/obligasi, dividen saham, dan lain-lain) dibandingkan dengan pertumbuhan pendapatan dari gaji. Apabila yang pertama terus lebih tinggi daripada yang kedua, kesenjangan akan terus melebar. Warren Buffet, salah satu orang terkaya dunia dengan aset USD66 miliar, menyatakan bahwa dirinya membayarkan pajak pada tingkat (*tax rate*) lebih rendah dari sekretarisnya. Karena pendapatannya berasal dari saham dan obligasi yang tingkat pajaknya lebih rendah dari gaji pegawai.

Memperkuat Akses Pemerataan Pembangunan

Sejak tahun 1980 an sampai dengan skearng masih diwarnai perdebatan ekonomi yang menyatakan bahwa masyarakat harus memilih atau mendahulukan pertumbuhan ekonomi atau senaliknya mengurangi kesenjangan? Namun, tidak sedikit studi yang menyatakan bahwa mengurangi kesenjangan juga mendorong pertumbuhan ekonomi. Jerman pada masa kepemimpinan Kanselir Bismarck secara sadar memberikan jaminan sosial dan memberikan pendidikan yang berkualitas pada warganya terlepas dari kemampuan ekonomi. Jerman menjadi negara yang tinggi produktivitas dan pendapatannya, sambil menjaga kesenjangan rendah. Strategi ini kemudian ditiru oleh beberapa negara berkembang lainnya

Kondisi di Indonesia menghadapi kesenjangan tajam antara kota dan desa, khususnya di daerah terpencil, pegunungan, dan pulau kecil. Studi menemukan bahwa di kota terdapat 8% masyarakat yang sulit mengakses layanan kesehatan dan 7% untuk pendidikan. Namun, di perdesaan angkanya meloncat ke 41% dan 40%. Sangat jomplang. Bayangkan bila kita tinggal di salah satu dari 2.519 desa terpencil yang belum tersambung listrik. Kelas di sekolah tanpa lampu dan anak kecil tidak bisa belajar di malam hari. Lantaran tanpa pompa air, banyak waktu akan dihabiskan untuk mengangkut air dari sungai terdekat yang belum tentu bersih.

Anak yang selama balita terjangkit penyakit infeksi akibat air tidak bersih terancam terganggu pertumbuhannya sehingga ketika dewasa sulit menjadi warga yang produktif. Saat ini proporsi anak di Indonesia yang terhambat pertumbuhannya lebih dari dua kali lipat Malaysia dan Thailand. Bila tidak ada perubahan, kemiskinan itu diwariskan ke generasi berikutnya. Berkebalikan dengan itu, anak-anak di kota memiliki akses luas ke layanan pendidikan, kesehatan, dan internet sehingga lebih siap bersaing.

Mengurangi kesenjangan tidak bisa dipisahkan dari membangun desa sehingga lingkaran setan kemiskinan bisa diputus. Jangan lagi terulang anak dari keluarga miskin sering sakit karena kurang air bersih dan tidak bisa belajar dengan baik, serta tidak tinggi pendidikannya sehingga berpendapatan rendah. Jaringan listrik yang saat ini masih hanya menjangkau 81,5% masyarakat menjadi sangat penting untuk menaikkan kesejahteraan dan kesempatan penduduk desa. Berikutnya adalah akses ke air bersih sehingga mengurangi kerentanan terhadap penyakit, khususnya bagi balita.

Diikuti berikutnya dengan akses terhadap pendidikan berkualitas sehingga bisa meningkatkan taraf hidup generasi mendatang. Keanggotaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk rakyat miskin perlu diprioritaskan, sehingga keluarganya tidak terbelit utang apabila suatu waktu sakit berat atau mengalami kecelakaan.

Program-program tersebut tidak murah dan tidak dapat ditutup hanya dari dana desa. Pemerintah perlu mengubah kebijakan di mana pendapatan dari simpanan bank, obligasi dan jual beli saham, serta jual beli tanah, dianggap sebagai pajak final dengan tarif yang lebih rendah dari pada tingkat pajak dari gaji sesuai saran Piketty dan Warren Buffet. Untuk mencapai pertumbuhan yang merata serta membalikkan kesenjangan dengan

timpangnya posisi tawar rakyat miskin di Indonesia sungguh tidak mudah dan perlu waktu.

Menurunkan Angka Kemiskinan

Perbedaan pandangan dari setiap ahli tentang kemiskinan merupakan hal yang wajar. Hal ini karena data, dan metode penelitian yang berbeda , tetapi justru terletak pada latar belakang idiologisnya. Menurut Weber (Swasono , 1987), ideologi bukan saja menentukan macam masalah yang dianggap penting, tetapi juga mempengaruhi cara mendefenisikan masalah sosial ekonomis, dan bagaimana masalah sosial ekonomi itu diatasi.

Kemiskinan disepakati sebagai masalah yang bersifat sosial ekonomi, tetapi penyebab dan cara mengatasinya terkait dengan ideologi yang melandasinya. Untuk memahami ideologi tersebut ada tiga pandangan pemikiran yaitu konservatisme, liberalisme, dan radikalisme (Swasono, 1987). Penganut masing-masing pandangan memiliki cara pandang yang berbeda dalam menjelaskan kemiskinan. Kaum konservatif memandang kemiskinan bermula dari karakteristik khas orang miskin itu sendiri. Orang menjadi miskin karena tidak mau bekerja keras , boros, tidak mempunyai rencana, kurang memiliki jiwa wiraswasta, fatalis, dan tidak ada hasrat untuk berpartisipasi.

Menurut Oscar Lewis (1983), orang-orang miskin adalah kelompok yang mempunyai budaya kemiskinan sendiri yang mencakup karakteristik psikologis sosial, dan ekonomi. Kaum liberal memandang bahwa manusia sebagai makhluk yang baik tetapi sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Budaya kemiskinan hanyalah semacam realistic and situational adaptation pada lingkungan yang penuh diskriminasi dan peluang yang sempit. Kaum radikal mengabaikan budaya kemiskinan, mereka menekankan peranan struktur ekonomi, politik dan sosial, dan memandang bahwa manusia adalah makhluk yang kooperatif, produktif dan kreatif.

Philips dan Legates (1981) mengemukakan empat pandangan tentang kemiskinan, yaitu pertama, kemiskinan dilihat sebagai akibat dari kegagalan personal dan sikap tertentu khususnya ciri-ciri sosial psikologis individu dari si miskin yang cenderung menghambat untuk melakukan perbaikan nasibnya. Akibatnya, si miskin tidak melakukan rencana ke depan, menabung dan mengejar tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Kedua, kemiskinan dipandang sebagai akibat dari sub budaya tertentu yang diturunkan dari generasi ke

generasi. Kaum miskin adalah kelompok masyarakat yang memiliki subkultur tertentu yang berbeda dari golongan yang tidak miskin, seperti memiliki sikap fatalis, tidak mampu melakukan pengendalian diri, berorientasi pada masa sekarang, tidak mampu menunda kenikmatan atau melakukan rencana bagi masa mendatang, kurang memiliki kesadaran kelas, atau gagal dalam melihat faktor-faktor ekonomi seperti kesempatan yang dapat mengubah nasibnya. Ketiga, kemiskinan dipandang sebagai akibat kurangnya kesempatan, kaum miskin selalu kekurangan dalam bidang keterampilan dan pendidikan untuk memperoleh pekerjaan dalam masyarakat. Keempat, bahwa kemiskinan merupakan suatu ciri struktural dari kapitalisme, bahwa dalam masyarakat kapitalis segelintir orang menjadi miskin karena yang lain menjadi kaya

Jika dikaitkan dengan pandangan konservatisme, liberalisme dan radikalisme, maka poin pertama dan kedua tersebut mencerminkan pandangan konservatif, yang cenderung mempersalahkan kemiskinan bersumber dari dalam diri si miskin itu sendiri. Ketiga lebih mencerminkan aliran liberalisme, yang cenderung menyalahkan ketidakmampuan struktur kelembagaan yang ada. Keempat dipengaruhi oleh pandangan radikal yang mempersalahkan hakekat atau perilaku negara kapitalis.

Masing-masing pandangan tersebut bukan hanya berbeda dalam konsep kemiskinan saja, tetapi juga dalam implikasi kebijakan untuk menanggulanginya. Keban (1994) menjelaskan bahwa pandangan konservatif cenderung melihat bahwa program-program pemerintah yang dirancang untuk mengubah sikap mental si miskin merupakan usaha yang sia-sia karena akan memancing manipulasi kenaikan jumlah kaum miskin yang ingin menikmati program pelayanan pemerintah. Pemerintah juga dilihat sebagai pihak yang justru merangsang timbulnya kemiskinan. Aliran liberal yang melihat si miskin sebagai pihak yang mengalami kekurangan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, pekerjaan dan perumahan yang layak, cenderung merasa optimis tentang kaum miskin dan menganggap mereka sebagai sumber daya yang dapat berkembang seperti halnya orang-orang kaya. Bantuan program pemerintah dipandang sangat bermanfaat dan perlu direalisasikan. Pandangan radikal memandang bahwa kemiskinan disebabkan struktur kelembagaan seperti ekonomi dan politiknya, maka kebijakan yang dapat ditempuh adalah dengan melakukan perubahan kelembagaan ekonomi dan politik secara radikal.

Menurut Flanagan (1994), ada dua pandangan yang berbeda tentang kemiskinan, yaitu *culturalist* dan *structuralist*. *Kulturalis* cenderung menyalahkan kaum miskin, meskipun kesempatan ada mereka gagal memanfaatkannya, karena terjebak dalam budaya kemiskinan. *Strukturalis* beranggapan bahwa sumber kemiskinan tidak terdapat pada diri orang miskin, tetapi adalah sebagai akibat dari perubahan priodik dalam bidang sosial dan ekonomi seperti kehilangan pekerjaan, rendahnya tingkat upah, diskriminasi dan sebagainya. Implikasi dari dua pandangan ini juga berbeda, terhadap konsep *kulturalis* perlu dilakukan perubahan aspek kultural misalnya pengubahan kebiasaan hidup. Hal ini akan sulit dan memakan waktu lama, dan biaya yang tidak sedikit. Terhadap konsep *kulturalis* perlu dilakukan pengubahan struktur kelembagaan seperti kelembagaan ekonomi, sosial dan kelembagaan lain yang terkait.

Kemiskinan merupakan langkah penting bagi perencana program dalam mengatasi kemiskinan. Menurut Sutrisno (1993), ada dua sudut pandang dalam memahami substansi kemiskinan di Indonesia. Pertama adalah kelompok pakar dan aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mengikuti pikiran kelompok agrarian populism, bahwa kemiskinan itu hakekatnya, adalah masalah campur tangan yang terlalu luas dari negara dalam kehidupan masyarakat pada umumnya, khususnya masyarakat pedesaan. Dalam pandangan ini, orang miskin mampu membangun diri mereka sendiri apabila pemerintah memberi kebebasan bagi kelompok itu untuk mengatur diri mereka sendiri. Kedua, kelompok para pejabat, yang melihat inti dari masalah kemiskinan sebagai masalah budaya. Orang menjadi miskin karena tidak memiliki etos kerja yang tinggi, tidak memiliki jiwa wiraswasta, dan pendidikannya rendah. Disamping itu, kemiskinan juga terkait dengan kualitas sumberdaya manusia. Berbagai sudut pandang tentang kemiskinan di Indonesia dalam memahami kemiskinan pada dasarnya merupakan upaya orang luar untuk memahami tentang kemiskinan. Hingga saat ini belum ada yang mengkaji masalah kemiskinan dari sudut pandang kelompok miskin itu sendiri.

Kajian Chambers (1983) lebih melihat masalah kemiskinan dari dimensi si miskin itu sendiri dengan *deprivation trap*, tetapi Chambers sendiri belum menjelaskan tentang alasan terjadinya *deprivation trap* itu. Dalam tulisan ini dicoba menggabungkan dua sudut pandang dari luar kelompok miskin, dengan mengembangkan lima unsur keterjebakan yang dikemukakan

oleh Chambers (1983), yaitu : (1) kemiskinan itu sendiri, (2) kelemahan fisik, (3) Keterasingan, (4) Kerentanan, dan (5) Ketidak berdayaan.

Pengertian kemiskinan disampaikan oleh beberapa ahli atau lembaga, diantaranya adalah BAPPENAS (1993) mendefinisikan keiskinan sebagai situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena kehendak oleh si miskin, melainkan karena keadaan yang tidak dapat dihindari dengan kekuatan yang ada padanya. Levitan (1980) mengemukakan kemiskinan adalah kekurangan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standar hidup yang layak. Faturchman dan Marcelinus Molo (1994) mendefinisikan bahwa kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dan atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Menurut Ellis (1994) kemiskinan merupakan gejala multidimensional yang dapat ditelaah dari dimensi ekonomi, sosial politik. Menurut Suparlan (1993) kemiskinan didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Reitsma dan Kleinpenning (1994) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya, baik yang bersifat material maupun non material. Friedman (1979) mengemukakan kemiskinan adalah ketidaksamaan kesempatan untuk memformulasikan basis kekuasaan sosial, yang meliputi : asset (tanah, perumahan, peralatan, kesehatan), sumber keuangan (pendapatan dan kredit yang memadai), organisasi sosial politik yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai kepentingan bersama, jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang atau jasa, pengetahuan dan keterampilan yang memadai, dan informasi yang berguna. Dengan beberapa pengertian tersebut dapat diambil satu pengertian bahwa kemiskinan adalah suatu situasi baik yang merupakan proses maupun akibat dari adanya ketidakmampuan individu berinteraksi dengan lingkungannya untuk kebutuhan hidupnya.

Selo Sumarjan (1993) mengemukakan bahwa budaya kemiskinan adalah tata hidup yang mengandung sistem kaidah serta sistem nilai yang menganggap bahwa taraf hidup miskin disandang suatu masyarakat pada suatu waktu adalah wajar dan tidak perlu diusahakan perbaikannya. Kemiskinan yang diderita oleh masyarakat dianggap sudah menjadi nasib dan tidak mungkin dirubah, karena itu manusia dan masyarakat harus

menyesuaikan diri pada kemiskinan itu, agar tidak merasa keresahan jiwa dan frustrasi secara berkepanjangan. Dalam rangka budaya miskin ini, manusia dan masyarakat menyerah kepada nasib dan bersikap tidak perlu, dan bahkan juga tidak mampu menggunakan sumber daya lingkungan untuk mengubah nasib.

Menurut Oscar Lewis (1983), budaya kemiskinan merupakan suatu adaptasi atau penyesuaian, dan sekaligus juga merupakan reaksi kaum miskin terhadap kedudukan marginal mereka di dalam masyarakat yang berstrata kelas, sangat individualist dan berciri kapitalisme. Budaya tersebut mencerminkan suatu upaya mengatasi rasa putus asa dan tanpa harapan, yang merupakan perwujudan dan kesadaran akan mustahilnya mencapai akses, dan lebih merupakan usaha menikmati masalah yang tak terpecahkan (tak tercukupi syarat, tidak sanggup). Budaya kemiskinan melampaui batas-batas perbedaan daerah, perbedaan pedesaan-perkotaan, perbedaan bangsa dan negara, dan memperlihatkan perasaan yang mencolok dalam struktur keluarga, hubungan-hubungan antar pribadi, orientasi waktu, sistem-sistem nilai, dan pola-pola pembelanjaan.

Menurut Lewis (1983), budaya kemiskinan dapat terwujud dalam berbagai konteks sejarah, namun lebih cenderung untuk tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat yang memiliki seperangkat kondisi: (1) Sistem ekonomi uang, buruh upahan dan sistem produksi untuk keuntungan, (2) tetap tingginya tingkat pengangguran dan setengah pengangguran bagi tenaga tak terampil; (3) rendahnya upah buruh; (4) tidak berhasilnya golongan berpenghasilan rendah meningkatkan organisasi sosial, ekonomi dan politiknya secara sukarela maupun atas prakarsa pemerintah; (5) sistem keluarga bilateral lebih menonjol daripada sistem unilateral; dan (6) kuatnya seperangkat nilai-nilai pada kelas yang berkuasa yang menekankan penumpukan harta kekayaan dan adanya kemungkinan mobilitas vertikal, dan sikap hemat, serta adanya anggapan bahwa rendahnya status ekonomi sebagai hasil ketidak sanggupannya pribadi atau memang pada dasarnya sudah rendah kedudukannya.

Budaya kemiskinan bukanlah hanya merupakan adaptasi terhadap seperangkat syarat-syarat obyektif dari masyarakat yang lebih luas, sekali budaya tersebut sudah tumbuh, ia cenderung melanggengkan dirinya dari generasi ke generasi melalui pengaruhnya terhadap anak-anak. Budaya kemiskinan cenderung berkembang bila sistem-sistem ekonomi dan sosial

yang berlapis-lapis rusak atau berganti, seperti masa pergantian feodalis ke kapitalis atau pada masa pesatnya perubahan teknologi. Budaya kemiskinan juga merupakan akibat penjajahan yakni struktur ekonomi dan sosial pribumi diobrak, sedangkan atatus golongan pribumi tetap dipertahankan rendah, juga dapat tumbuh dalam proses penghapusan suku. Budaya kemiskinan cenderung dimiliki oleh masyarakat strata sosial yang lebih rendah, masyarakat terasing, dan warga urban yang berasal dari buruh tani yang tidak memiliki tanah

Menurut Parker Seymour dan Robert J. Kleiner (1983) formulasi kebudayaan kemiskinan mencakup pengertian bahwa semua orang yang terlibat dalam situasi tersebut memiliki aspirasi-aspirasi yang rendah sebagai salah satu bentuk adaptasi yang realistis. Beberapa ciri kebudayaan kemiskinan adalah : (1) fatalisme, (2) rendahnya tingkat aspirasi, (3) rendahnya kemauan mengejar sasaran, (4) kurang melihat kemajuan pribadi , (5) perasaan ketidak berdayaan/ketidakmampuan, (6) Perasaan untuk selalu gagal, (7) Perasaan menilai diri sendiri negatif, (8) Pilihan sebagai posisi pekerja kasar, dan (9) Tingkat kompromis yang menyedihkan.

Berkaitan dengan budaya sebagai fungsi adaptasi, maka suatu usaha yang sungguh-sungguh untuk mengubah nilai-nilai yang tidak diinginkan ini menuju ke arah yang sesuai dengan nilai-nilai golongan kelas menengah, dengan menggunakan metode-metode psikiatri kesejahteraan sosial-pendidikan tanpa lebih dahulu (ataupun secara bersamaan) berusaha untuk secara berarti mengubah kenyataan kenyataan struktur sosial (pendapatan, pekerjaan, perumahan, dan pola-pola kebudayaan membatasi lingkup partisipasi sosial dan peyaluran kekuatan sosial) akan cenderung gagal. Budaya kemiskinan bukannya berasal dari kebodohan, melainkan justru berfungsi bagi penyesuaian diri.

Hal penting dalam membahas kemiskinan dan kebudayaan adalah untuk mengetahui seberapa cepat orang-orang miskin akan mengubah kelakuan mereka, jika mereka mendapat kesempatan-kesempatan baru; dan macam hambatan atau halangan-halangan yang baik atau buruk yang akan timbul dari reaksi tersebut terhadap situasi-situasi masa lampau. Untuk menentukan macam kesempatan-kesempatan yang harus diciptaan untuk menghapus kemiskinan, yaitu mendorong orang-orang miskin melakukan adaptasi terhadap kesempatan-kesempatan yang bertentangan dengan pola-pola kebudayaan yang mereka pegang teguh dan cara mereka dapat mempertahankan pola-pola kebudayaan yang mereka pegang teguh tersebut

agar tidak akan bertentangan dengan aspirasi-aspirasi lainnya. Hanya orang-orang miskin yang tidak mampu menerima kesempatan-kesempatan karena mereka tidak dapat membuang norma-norma kelakukan yang digolongkan sebagai pendukung kebudayaan kelas bawah.

Akibat kemiskinan tersebut, sebahagian besar penduduk Indonesia menghadapinya dengan nilai-nilai pasrah atau nrimo (kemiskinan kebudayaan). Terbentuknya pola pikir dan prilaku pasrah itu dalam jangka waktu yang lama akan berubah menjadi semacam “institusi permanen” yang mengatur prilaku mereka dalam menyelesaikan problematika di dalam hidup mereka atau krisis lingkungan mereka sendiri (Lewis, 1968 dalam Haba, 2001). Menurut penganut paradigma kemiskinan kebudayaan ini, orang yang berada dalam kondisi serupa tidak sanggup melihat peluang dan jalan keluar untuk memperbaiki kehidupannya. Karakteristik kelompok ini terlihat dari pola substansi mereka yang berorientasi dari tangan ke mulut (from hand to mouth) (Haba, 2001).

Konsisten dengan Parameter Kemiskinan

Kemiskinan struktural menurut Selo Sumarjan (1980) adalah kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial masyarakat itu tidak dapat ikut menggunakan sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Kemiskinan struktural adalah suasana kemiskinan yang dialami oleh suatu masyarakat yang penyebab utamanya bersumber pada struktur sosial, dan oleh karena itu dapat dicari pada struktur sosial yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri. Golongan kaum miskin ini terdiri dari ; (1) Para petani yang tidak memiliki tanah sendiri, (2) Petani yang tanah miliknya begitu kecil sehingga hasilnya tidak cukup untuk memberi makan kepada dirinya sendiri dan keluarganya, (3) Kaum buruh yang tidak terpelajar dan tidak terlatih (unskilled labourers), dan (4) Para pengusaha tanpa modal dan tanpa fasilitas dari pemerintah (golongan ekonomi lemah).

Kemiskinan struktural tidak sekedar terwujud dengan kekurangan sandang dan pangan saja, kemiskinan juga meliputi kekurangan fasilitas pemukiman yang sehat, kekurangan pendidikan, kekurangan komunikasi dengan dunia sekitarnya, sosial yang mantap.

Beberapa ciri kemiskinan struktural, menurut Alpien (1980) adalah (1) Tidak ada atau lambannya mobilitas sosial (yang miskin akan tetap hidup

dengan kemelaratanya dan yang kaya akan tetap menikmati kemewahannya), (2) mereka terletak dalam kungkungan struktur sosial yang menyebabkan mereka kekurangan hasrat untuk meningkatkan taraf hidupnya, dan (3) Struktur sosial yang berlaku telah melahirkan berbagai corak rintangan yang menghalangi mereka untuk maju. Pemecahan permasalahan kemiskinan akan bisa dilakukan bilamana struktur sosial yang berlaku itu dirubah secara mendasar.

Soedjatmoko (1984) memberikan contoh kemiskinan structural; (1) Pola stratifikasi (seperti dasar pemilikan dan penguasaan tanah) di desa mengurangi atau merusak pola kerukunan dan ikatan timbal-balik tradisional, (2) Struktur desa nelayan, yang sangat tergantung pada juragan di desanya sebagai pemilik kapal, dan (3) Golongan pengrajin di kota kecil atau pedesaan yang tergantung pada orang kota yang menguasai bahan dan pasarnya. Hal-hal tersebut memiliki implikasi tentang kemiskinan structural : (1) kebijakan ekonomi saja tidak mencukupi dalam usaha mengatasi ketimpangan-ketimpangan struktural, dimensi struktural perlu dihadapi juga terutama di pedesaan; dan (2) perlunya pola organisasi institusi masyarakat pedesaan yang disesuaikan dengan keperluannya, sebagai sarana untuk mengurangi ketimpangan dan meningkatkan bargaining power, dan perlunya proses Sosial learning yang spesifik dengan kondisi setempat.

Pada hakekatnya perbedaan antara si kaya dengan si miskin tetap akan ada, dalam sistem sosial ekonomi manapun. Yang lebih diperlukan adalah bagaimana lebih memperkecil kesenjangan sehingga lebih mendekati perasaan keadilan sosial. Sudjatmoko (1984) berpendapat bahwa, pembangunan yang semata-mata mengutamakan pertumbuhan ekonomi akan melanggengkan ketimpangan struktural. Pola netes ke bawah memungkinkan berkembangnya perbedaan ekonomi, dan perilaku pola mencari nafkah dari pertanian ke non pertanian, tetapi proses ini akan lamban dan harus diikuti dengan pertumbuhan yang tinggi. Kemiskinan tidak dapat diatasi hanya dengan membantu golongan miskin saja, tanpa menghadapi dimensi-dimensi struktural seperti ketergantungan, dan eksploitasi. Permasalahannya adalah dimensi-dimensi struktural manakah yang mempengaruhi secara langsung terjadinya kemiskinan, bagaimana ketepatan dimensi untuk kondisi sosial budaya setempat.

Sinaga dan White (1980) menunjukkan aspek-aspek kelembagaan dan struktur agraris dalam kaitannya dengan distribusi pendapatan kemiskinan:

(1) penyebaran teknologi, bahwa bukan teknologi itu sendiri, tetapi struktur kelembagaan dalam masyarakat tempat teknologi itu masuk yang menentukan bahwa teknologi itu mempunyai dampak negatif atau positif terhadap distribusi pendapatan (2) lembaga perkreditan pedesaan, perkereditan yang menginginkan tercapainya pemerataan pendapatan, maka program perkreditan tersebut justru harus diskriminatif, artinya subsidi justru harus diberikan kepada petani kecil, bukan pemerataan berdasarkan pemilikan atau penguasaan lahannya; (3) kelembagaan yang mengatur distribusi penguasaan atas faktor-faktor produksi di pedesaan turut menentukan tingkat pendapatan dari berbagai golongan di masyarakat, karena tidak semata-mata ditentukan oleh kekuatan faktor ekonomi (interaksi antara penawaran dan permintaan) saja; dan (4) Struktur penguasaan atas sumber-sumber produksi bukan tenaga kerja (terutama tanah dan modal) yang lebih merata dapat meningkatkan pendapatan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan.

Simpulan

Tujuan ahir pembangunan nasional suatu negara pada dasarnya untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat dan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga dan stabil, daya beli masyarakat terpelihara, pengangguran teratasi, perbaikan pendapatan ekonomi masyarakat terus menaik, peningkatan pendapatan pajak juga terus membaik sehingga pemerintah dapat mengalokasikan peningkatan program pembangunan dari sektor pajak. Disamping itu masyarakat diharapkan dapat lebih merasakan kesejahteraan dari hasil pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.

Oleh karena itu maka pertumbuhan ekonomi yang berkualitas merupakan salah satu prasarat utama dalam mewujudkan pembangunan nasional. Pertumbuhan dianggap mampu menstimulasi dan mempercepat pelaksanaan dan mewujudkan pembangunan. Namun demikian pertumbuhan harus dibarengi dengan penguatan nilai-nilai keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian akses secara merata kepada masyarakat. Pertumbuhan yang berdimensi pemerataan menjadi rangkaian yang tidak terpisahkan dalam menjalankan pembangunan nasional secara berkelanjutan (sustainable development).

Pembangunan yang kurang memperhatikan unsur keadilan akan mendorong terjadinya kesenjangan ekonomi dan sosial. Untuk itu pemerintah harus mengelola pembangunan dengan memberikan akses dan

peluang yang sama kepada semua pihak, termasuk pelaku ekonomi UKM dan mikro. Konsentrasi ekonomi kepada kelompok usaha tertentu akan melahirkan disparitas sosial dan kemiskinan

DAFTAR PUSTAKA

- Alfinn, Mely G. Tan, dan Soemardjan. 1980. *Kemiskinan Struktural Suatu Bunga Rampai*. Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, Jakarta.
- D.C Korten dan Syahrir . 1988. *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- David C. Korten 1993. *Menuju Abad ke 21: Tindakan Sukarela dan Agenda Global*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Sritua Arief . 1988. *Teori dan Kebijaksanaan Pembangunan*. Pustaka Cidesindo, Jakarta
- Didin Damanhuri. 2010. *Ekonomi Politik dan Pembangunan*. IPB Press, Bogor
- Ahmad Erani Yustika. 2013 *Ekonomi Kelembagaan*. Penerbit Erlangga, Jakarta
- Baker, David, 1980, " *Memahami kemiskinan di Kota*". Prisma, 6 98), hal. 3-8.
- Dawam Raharjo, 1984, *Transformasi Pertanian, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja*, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia.
- Effendi, Tajuddin Noor, 2000, *Pembangunan Krisis, dan Arah Reformasi*, Muhnmmadiyah Universitas Press, Jakarta.
- Danny Burns. 1994. *The Politics of Decentralisation*. The Mac Millan Press Ltd, London